

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- A.A. Andi Prajitno, 2013, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa PPAT*, Selaras, Malang.
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Ansori Ahmad, 1986, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Penyusunan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria, 1980, *Buku Tuntunan Bagi Penjabat Pembuat Akta Tanah*, Yayasan Hidayana Bina Sejahtera, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ghansam Anand, 2017, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____ dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung.

- Herlien Budiono, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.M. Otto, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, Pustaka Larasan, Jakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Laboratorium Hukum FH UNPAR, 1997, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Maria Farida Indrati Soprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*, Revka Petra Media, Surabaya.
- _____, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Sumber Lainnya

Dedek Astani, 2020, “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Padang”, *Tesis*, Universitas Andalas, Padang.

Gabby Heinneke Viana Monintja dan Widodo Suryandoko, 2019, “Tinjauan Yuridis Mengenai Imbalan Jasa Pembuatan Salinan Akta Notaris oleh Pemegang Protokol (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/XI/2018”, *Indonesia Notary*, Volume 1 Nomor 2.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang.

<https://padang.go.id/page/sekilas-kota-padang>.

<https://www.atrbpn.go.id/daftar-ppat>.

Husna Handayani, Aminuddin Ilmar, dan Muhammad Aswan, 2023, “Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Amanna Gappa*, Volume 31, Nomor 2.

I Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal IUS*, Volume 4, Nomor 1.

Iza Rumesten RS, Febrian, Helmanida, Neisa Angrum Adisti, 2021, “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal”, *Jurnal Repertorium*, Volume 10, Nomor 1.

Keysha Nashwa Aulia, dkk, 2024, “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Sains Student Research*, Volume 2, Nomor 1.

Michael Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2018.

Netti, 2021, “Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memungut Uang Jasa di Kota Bukittinggi”, *Tesis*, Universitas Andalas, Padang.

Nidya Kartika Sari, 2019, “Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Memuat Nilai Transaksi Tidak Sebenarnya”, *Tesis*, Universitas Andalas, Padang.

Purwaning Rahayu Sisworini, Abdul Majid, dan Herman Suryokumoro, 2020, “Penerapan Honorarium PPAT Sebagai Upaya Untuk Penyetaraan Pelayanan (Studi Kasus di Kota Malang)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Issue 3.

Rahma Faedhatu, Sapto Hermawan, dan Mulyanto, 2024, “Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik”, *IAPA International Conference*, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1061>.

- Riastri Haryani, “Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Binamulia Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2017.
- Rizal Irvan Amin, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Res Publica*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 1, 2019.

